Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora (2025) 2:2, 1-15
ISSN 1111-1111 | DOI: 10.11111/nusantara.xxxxxxx
Diterbitkan oleh FORIKAMI (Forum Riset Ilmiah Kajian Masyarakat Indonesia)
Tersedia online Pada Bulan Januari 2025.

Akhir Era Orde Baru Dan Awal Reformasi Di Indonesia

Ujang Hermansyah; Raihan Sauki Faznur; Universitas Pasundan**,** **Ujanghermansyah088@gmail.com**

ABSTRACT: Community dissatisfaction, injustice and pressure emerged as a result of the New Order government in Indonesia. In the New Order era, the central government had a strong centralized system that placed decision making and control in its hands. This centralization has had a significant effect on various aspects of people's lives, in both good and bad ways. During the New Order, the practice of Collusion, Corruption and Nepotism (KKN) increased and was often used for the interests of certain individuals or groups. Many citizens feel disadvantaged by injustice in the distribution of resources and economic opportunities, which makes them more dissatisfied with the government. In early May 1998, students spearheaded a protest demanding the elimination of the practice of KKN. The situation worsened, and students demanded that Suharto step down from his position as president. The demonstration on 12 May 1998 caused many victims, including three Trisakti students who died in clashes with the police. After this tragedy, Suharto's government became increasingly highlighted and spread throughout almost all of Indonesia. Finally, Suharto resigned from his position due to pressure from within and outside the country, and was replaced by his deputy. After BJ. Habibie rose to become president and made policies that made big changes in Indonesia. This is where the era of reform began.

KEYWORDS: Indonesian Reformation, New Order, 1998 Trisakti Tragedy

ABSTRAK: Ketidakpuasan masyarakat, ketidakadilan, dan tekanan muncul sebagai akibat dari pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Pada era Orde Baru, pemerintahan pusat memiliki sistem sentralisasi yang kuat yang menempatkan pengambilan keputusan dan kontrol di tangannya. Sentralisasi ini memiliki efek yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dengan cara yang baik maupun yang buruk. Selama Orde Baru, praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) meningkat dan sering digunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu. Banyak warga merasa dirugikan karena ketidakadilan dalam pembagian sumber daya dan kesempatan ekonomi, yang membuat mereka lebih tidak puas dengan pemerintah. Pada awal Mei 1998, mahasiswa mempelopori rasa menuntut dihapuskannya praktik KKN. Keadaan semakin memburuk, dan mahasiswa menuntut Soeharto turun dari jabatannya sebagai presiden. Demonstrasi pada 12 Mei 1998 menyebabkan banyak korban, termasuk tiga mahasiswa Trisakti yang tewas dalam bentrok dengan polisi. Setelah tragedi tersebut, pemerintahan Soeharto semakin disorot dan tersebar hampir di seluruh Indonesia. Akhirnya, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya karena tekanan dari dalam dan luar negeri, dan

diganti oleh wakilnya. Setelah BJ. Habibie naik menjadi presiden dia membuat kebijakan-kebijakan yang membuat perubahan besar di Indonesia. Di sinilah era reformasi di mulai.

KATA KUNCI: Reformasi Indonesia, Orde Baru, Tragedi Trisakti 1998

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara terpadat keempat di dunia yang secara geografis berlokasi diantara dua benua besar yaitu Benua Asia dan Benua .

Latar belakang

Orde baru atau yang dikenal juga dengan sebutan Orba adalah tatanan pemerintah dengan sistem baru di Indonesia. Sejarah: Pada 20 Januari 1998, Presiden Soeharto secara resmi diterima sebagai kandidat presiden oleh Golkar (Partai Golongan karya). Setelah terpilih dan menjabat sebagai presiden, Soeharto membentuk kabinet baru dengan menempatkan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial dan teman dekatnya Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

MPR secara hukum mewakili kedaulatan rakyat sebagai wakil rakyat. Namun, secara de jure, anggota MPR diatur dan diatur, sehingga sebagian besar anggota diangkat berdasarkan nepotisme.

Pada awal Mei 1998, mahasiswa memulai gerakan untuk menuntut dihapuskannya Korupsi Kolusi dan Nepotisme, penurunan harga kebutuhan pokok, dan pelepasan Soeharto dari jabatan presiden. Pada 12 Mei 1998, terjadi bentrokan dengan polisi saat para mahasiswa melakukan demonstrasi. Beberapa mahasiswa Trisakti mengalami cedera dan bahkan meninggal dalam peristiwa tersebut.

Setelah tragedi TRISAKTI, yang kemudian memicu kerusuhan 13 Mei 1998 sehari setelahnya, pemerintah Soeharto semakin disorot. Selain itu, gerakan mahasiswa tersebar di hampir seluruh Indonesia. Akhirnya, Soeharto memutuskan untuk memundurkan diri dari jabatannya di bawah tekanan yang signifikan baik di dalam maupun di luar negeri. Dengan latar belakang ini, saya berusaha menjelaskan berbagai faktor yang menyebabkan sistem pemerintahan orde baru runtuh, yang dipimpin oleh Soeharto, yang kemudian mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pemimpin sistem tersebut.

Setelah runtuhnya pemerintahan Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998, perubahan di Indonesia berlangsung cepat dan dinamis.

Orang-orang menuntut demokratisasi di seluruh masyarakat dan hukuman tegas bagi mereka yang melakukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Situasi ini membuat Indonesia harus berusaha mengatasi krisis sejarahnya di tengah arus perubahan yang terus bergulir dengan melakukan agenda reformasi.

Dengan adanya teori politik dari Karl Marx dapat di kaitkan dengan permasalahan di atas karena menggambarkan ketidaksetaraan kekuasaan yang dapat menciptakan konflik antara pemerintah dan masyarakat, dalam hal ini pemerintah Orde Baru di pandang sebagai legitimasi kekuasaan yang menindas rakyat, penindasannya melalui pelanggaran hak asasi manusia yang menciptakan ketidakadilan dalam aspek sosial dan politik

Aksi Mahasiswa menduduki Gedung DPR/MPR di Jakarta (19/05/1998), untuk melengserkan Presiden Soeharto. Ini dilakukan setelah peristiwa penembakan terhadap Mahasiswa Universitas Trisakti pada 12 Mei 1998 yang membuat seluruh masyarakat marah dan berduka. (FOTO : Teguh Indra/Republika)

https://visual.republika.co.id/berita/qaou9n375/potret-reformasi-1998-dan-lengsernya-soeharto

Pengunduran diri Presiden Soeharto yang mengawali masa reformasi Indonesia(wikimedia.org)

https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/21/070000265/hari-hari-lengsernya-soeharto-setelah-32-tahun-menjabat-presiden?page=all

B. Rumusan masalah

Keruntuhan pemerintahan Orde Baru disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk krisis moneter yang parah, menurunnya kepercayaan masyarakat akibat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta insiden Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang melibatkan penembakan mahasiswa oleh aparat keamanan, yang memicu kerusuhan besar-besaran di seluruh Indonesia dan menuntut reformasi; pasca- reformasi, kebijakan pemerintah mengalami perubahan signifikan dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, peningkatan otonomi daerah dan penegakan hak asasi manusia.

C. Tujuan

Tujuan penelitiian ini adalah untuk mengkaji informasi mengenai kehancuran orde baru yang di pimpiin oleh reziim Soeharto dan awal era reformasi yang di pimpin oleh rezim BJ. Habibie, serta membahas sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan Soeharto, memberikan pengetahuan mengenai dampak kerusuhan pada tahun 1998, dan membahas tentang peralihan kekuasaan Soeharto ke BJ. Habibie.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dimana melalui metode ini, peneliti berusaha untuk menggambarkan pemerintahan pada era orde baru. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemerintahan yang di pimpin oleh Soeharto pada masa Orde Baru transisi ke era reformasi di bawah pimpinan BJ. Habibie. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis. Jenis penelitian yang di gunakan adalah studi literatur. Sumber-sumber yang di gunakan adalah bersumber dari internet.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Krisis Moneter dan Dampak Politiknya di Indonesia

Menurut Putri Kuemala Sari dan Fakhruddin (2016), krisis moneter 1997-1998 tidak sekadar gejolak ekonomi, melainkan katalis perubahan fundamental di Indonesia. Sebagaimana diungkapkan Fukuoka (2013), "Reformasi politik-ekonomi lebih merupakan respons reaktif ketimbang transformasi sistemik."

Dalam bidang ekonomi, krisis menimbulkan konsekuensi multidimensi. Depresiasi mata uang mengakibatkan "inflasi tinggi yang mengurangi daya beli masyarakat" (Putri Kuemala Sari & Fakhruddin, 2016). Investor domestik dan asing menarik dana, menciptakan ketidakpastian ekonomi yang mendalam.

B. Dampak Politik yang Kompleks

Krisis moneter memicu ketidakstabilan pemerintahan. Michael Camdessus, Direktur IMF saat itu, mengakui: "Kebijakan IMF berkontribusi signifikan pada tekanan ekonomi Indonesia." Amien Rais menekankan peran kunci gerakan mahasiswa, menyatakan bahwa "mobilisasi massa" menjadi faktor penting dalam proses reformasi.

C. Tekanan Internasional dan Transformasi Sosial

Lembaga internasional seperti IMF memberikan bantuan dengan syarat ketat, membatasi otonomi Politik domestik. Steve Hanke, ekonom dari Johns Hopkins University, bahkan berpendapat bahwa "intervensi IMF justru memperburuk kondisi ekonomi Indonesia."

D. Tragedi Sosial dan Kemanusiaan

Krisis tidak sekadar berdampak ekonomis, namun juga sosial. Eka Wardani (2004) mencatat terjadinya "pelanggaran HAM berupa pembunuhan, penjarahan, dan kekerasan seksual." Noviyanti dkk. (2019) menyoroti bahwa perempuan etnis Tionghoa secara khusus menderita, menjadi "korban perusakan, penjarahan, dan pemerkosaan."

E. Transformasi Politik Pasca-Krisis

Djaja (2018) menggambarkan Orde Baru sebagai rezim "ditandai korupsi, kolusi, nepotisme tinggi, dan kehilangan kemandirian bangsa." Krisis moneter menjadi titik balik yang mengekspos kelemahan sistemik pemerintahan Soeharto.

F. Proses transisi era reformasi berlangsung setelah kejatuhan orde baru

Era reformasi di Indonesia merupakan transisi dari sistem orde baru yang cenderung tertutup dan otoriter ke sistem pemerintahan yang lebih demokratis. Perubahan yang signifikan terjadi, terutama dalam hal kepemimpinan dan partisipasi politik. Pada awal era reformasi, perempuan yang sebelumnya tidak mendapatkan haknya dalam politik mulai mendapatkan perhatian lebih, berkat adanya undang-undang baru yang memperjuangkan hak perempuan dalam berpolitik. Dengan pengunduran diri presiden Soeharto pada tahun 1998, Indonesia mengalami perubahan politik, menandai kembalinya demokrasi ke panggung politik nasional. Pada tahun 1998, pemilihan umum (pemilu) yang langsung dan bebas (LUBER) diadakan, dan diikuti oleh 48 partai politik mencerminkan terbukanya ruang politik yang lebih luas.

Selama era Reformasi, hubungan antara Presiden dan MPR yang sekarang berubah menjadi DPR mengalami transformasi yang signifikan. Jika sebelumnya DPR sering dianggap sebagai lembaga yang hanya menyetujui kebijakan eksekutif tanpa banyak pertimbangan, kini DPR berperan lebih aktif sebagai pengawas tindakan presiden. Reformasi ini berusaha mengadopsi model pemerintahan yang tidak hanya terfokus pada eksekutif seperti pada masa Orde Baru, atau terlalu dominan pada legislatif seperti pada masa Demokrasi Parlementer, tetapi mencari keseimbangan yang lebih baik antara kedua kekuasaan tersebut.

Pemerintahan B.J. Habibie dimulai setelah Soeharto mengundurkan diri dari kursi kepresidenan pada tanggal 21 Mei 1998. BJ. Habibie kemudian membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan, yang bertujuan untuk mengimplementasikan berbagai reformasi penting. Selama masa pemerintahannya, kebijakan yang diterapkan mencakup peningkatan kebebasan berpendapat dan perlindungan hak asasi

manusia, seperti pembebasan tahanan politik dan penghapusan pembatasan terhadap kebebasan pers. Selain itu, Habibie mempercepat proses pemilihan umum yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 1999 dan memutuskan hubungan organisatoris antara ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia) dengan partai politik. Pemerintahan Habibie berakhir pada 20 Oktober 1999, ketika Abdurrahman Wahid terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia. Wahid menggantikan Habibie setelah masa pemerintahannya yang singkat, yang berlangsung hanya selama satu tahun setelah Soeharto lengser

1. Teori

Sayidiman : " Apakah tidak lebih baik ketika pak Harto berada pada puncak kekuasaan dan karir mengikuti Deng Xioping dan Lee Kuan Yew, melepaskan diri dari pimpinan formal" tulis Syidiman.

Stave Hanke : Seorang ekonom dari Johns Hopkins University dan penasihat ekonomi Soeharto, berpendapat bahwa krisis moneter yang melanda Indonesia pada 1997-1998 diperparah oleh intervensi Internasional Monetary Fund (IMF). Menurutnya, kebijakan IMF justru memperburuk kondisi ekonomi Indonesia, yang pada akhirnya berkontribusi pada kejatuhan rezim Soeharto.

Michael Camdessus : Direktur pelaksana IMF saat itu, mengakui bahwa IMF memiliki peran dalam menciptakan kondisi yang mendorong pengunduran diri Soeharto. Ia menyatakan bahwa kebijakan IMF (Internasional Monetary Fund) berkontribusi pada tekanan ekonomi yang di hadapi Indonesia, yang kemudian memicu ketidakstabilan politik

Amien Rais : Salah satu tokoh reformasi, mengungkapkan bahwa gerakan mahasiswa dan tekanan dari masyarakat sipil memainkan peran penting dalam menumbangkan rezim Soeharto. Ia menekankan pentingnya mobilisasi massa dalam proses reformasi tersebut

2. Analisis

Orde baru, yang di pimpin oleh presiden Soeharto, berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Pemerintah ini di tandai dengan penerangan sistem politik otoriter dan praktik Kolusi, Korupsi, dan

Nepotisme (KKN). Kebijakan tersebut membuat masyarakat menderita akibat krisis moneter.

IV. KESIMPULAN

Pada masa pemerintahan Soeharto beliau selama kurang lebih 32 tahun. Soeharto telah melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang membuat negara Indonesia mengalami krisis moneter dan menyebabkan munculnya rasa ketidakpercayaan terhadap pemerintahan Soeharto. Krisis moneter terbagi menjadi 3 (tiga) bidang, yaitu bidang ekonomi, bidang politik, dan bidang sosial. Karena adanya dugaan Soeharto telah melakukan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa pada Mei 1998, pada saat mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa terjadi bentrok antara mahasiswa dan aparat keamanan yang mengakibatkan tewasnya 3 mahasiswa Trisakti tewas, akibat adanya korban jiwa seluruh mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa hampir di seluruh Indonesia. Dampak dari peristiwa tersebut terhadap Indonesia adalah adanya korban jiwa, kerugian, perubahan politik, pencarian keadilan. Setelah lengsernya Soeharto dan di gantikan oleh wakilnya yaitu BJ. Habibie, disinilah transisi dari Orde Baru ke era reformasi.

Pada masa kepemimpinan Soeharto beliau sering kali mempropagandakan isu contoh kasus setiap warga negara Indonesia yang tidak mempunyai agama (agama yang tidak tercantum ke dalam 5 yang di ketahui) maka di anggap sebagai komunis. Pada masa Orde Baru Soeharto membenci komunis banyak warga menjadi korban akibat di anggap sebagai komunis. Contoh kasus lain seseorang yang memiliki tato maka di anggap kriminal, makanya sampai saat ini masyarakat Indonesia menganggap tato adalah kriminal, setiap orang yang bertato pada masa Orde Baru sering menjadi sasaran PETRUS (Penembak Misterius). Akibatnya Soeharto mendapat tekanan dari luar negeri akibat kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

DAFTAR REFERENSI

Djaja, Wahyudi. (2018). Sejarah Informasi. (Klaten: Cempaka Putih).

Putri Kuemala Sari dan Fakhruddin, 2016. IDENTIFIKASI PENYEBAB KRISIS MONETER DAN KEBIJAKAN BANK SENTRAL DI INDONESIA: KASUS KRISIS TAHUN (1997-1998 dan 2008)

Eka Wardani, Anis Kusmita, dkk. 2014. PUBLIKA BUDAYA Munir Tokoh Pejuang HAM Tahun 1988-2004. Skripsi Unej

Noviyanti, N., dkk. (2019). Gerakan Reformasi 1998 di Kecamatan Kaliwates Kabupaten Jember (Pengrusakan Toko Milik Etnis Cina) dalam jurnal MUKADIMAH: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-Ilmu Sosial, 3(2): 1–5, doi: 10.30743/mkd.v3i2.1230.

Sindoro cendikia pendidikan, KRISIS MONETER 1997-1998: AKAR PENYEBAB, DAMPAK EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PENANGANAN DI Indonesia

Yusa' Farchan, DINAMIKA SISTEM POLITIK OTORITARIANISME ORDE BARU

Nazhicul Amin, A., Ana Rianti, E. ., Hanggarany, P., & Yunilasari, S. . (2023). Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Sebelum Dan Sesudah Krisis Moneter (Periode 1978-2018). *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, *2*(11), 916–921.

Fukuoka, Y. (2013). "Transisi Demokrasi Indonesia: Model Politik Klientelis. Tinjauan Kembali Demokratisasi. 20(6): 991–1013

Rendy Adiwilaga, Yani Alfian, Ujud Rusdia, Sistem Pemerintahan Indonesia

Narasi Newsroom : https://youtu.be/6LiHInRkz6E?si=UM9iDwmXQOXIHKDl

Nessie Jugde : https://youtu.be/D5BHX6oQhcM?si=Gpdu7h-rS7j4DTwv